

## **Analysis Of Macroeconomic Variables On Poverty In Districts/Cities In East Java Province**

### **Analisis Variabel Makroekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur**

**Suryati Setiani<sup>1\*</sup>**

Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia<sup>1</sup>  
b300220073@student.ums.ac.id<sup>1\*</sup>

*\*Corresponding Author*

---

#### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine the factors influencing poverty levels in districts/cities in East Java Province during the 2020–2024 period using a macroeconomic and human development approach. The variables analyzed include economic growth, the consumer price index (CPI), the human development index (HDI), and the gross enrollment rate (GER). The data used are secondary data sourced from publications by the Central Statistics Agency (BPS) and analyzed using panel data regression with a fixed-effects model and classical assumption testing. The estimation results indicate that economic growth and the HDI have a significant negative effect on poverty levels, while the CPI also has a negative effect but with a more moderate level of influence. Meanwhile, the GER shows a positive, though insignificant, effect on poverty. Overall, these findings indicate that increasing economic growth and the quality of human resources are key factors in reducing poverty, while expanding access to education needs to be accompanied by improvements in the quality of learning to have a real impact on community welfare.*

**Keywords :** Poverty, Economic Growth, CPI, HDI, GER, East Java.

#### **ABSTRAK**

Tujuan dari studi ini untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan pada wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024 melalui pendekatan makroekonomi dan pembangunan manusia. Variabel yang dianalisis mencakup pertumbuhan ekonomi, indeks harga konsumen (CPI), indeks pembangunan manusia (IPM), serta angka partisipasi kasar (APK). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis menggunakan metode regresi data panel dengan model efek tetap (*Fixed Effect Model*) serta melalui pengujian asumsi klasik. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan CPI juga berpengaruh negatif namun dengan tingkat pengaruh yang lebih moderat. Sementara itu, APK menunjukkan arah pengaruh positif meskipun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menekan angka kemiskinan, sedangkan perluasan akses pendidikan perlu disertai dengan peningkatan mutu pembelajaran agar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, IHK, IPM, APK, Jawa Timur.

### **1. Pendahuluan**

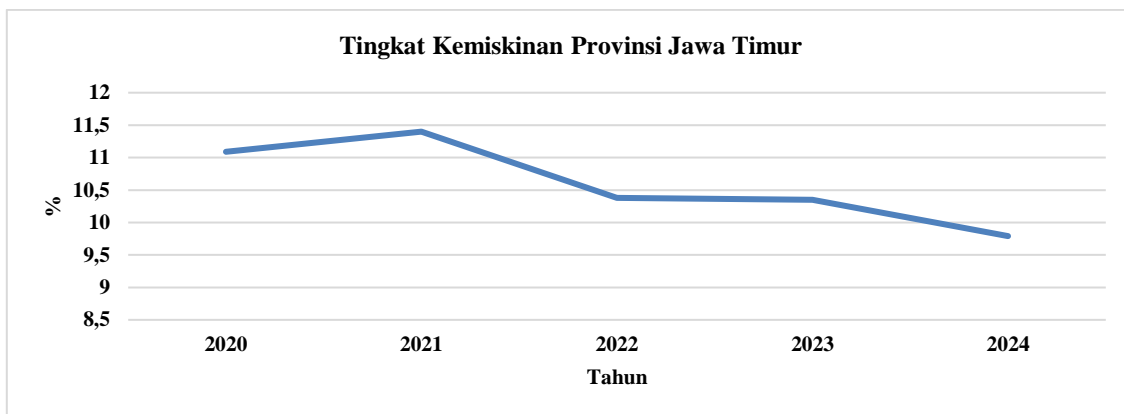
Permasalahan kemiskinan di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur masih menjadi isu krusial dalam proses pembangunan daerah. Walaupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi ini memperlihatkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, distribusi hasil pembangunan belum sepenuhnya merata, sehingga dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan masih terbatas. Ketimpangan antarwilayah, khususnya antara kawasan perkotaan dan pedesaan, mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum secara langsung berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, tekanan inflasi turut memengaruhi kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah karena kenaikan harga

kebutuhan dasar mengurangi kemampuan daya beli mereka. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan yang menegaskan bahwa variabel makroekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika kemiskinan di Indonesia (Septiadi & Nursan, 2020). Penelitian lain juga menyoroti bahwa kombinasi antara faktor ekonomi dan kualitas tata kelola kebijakan menjadi elemen kunci dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di tingkat daerah (Samputra & Munandar, 2019).

Selain variabel ekonomi makro, aspek pembangunan manusia juga memiliki peranan esensial dalam menekan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang meliputi dimensi kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak, memiliki keterkaitan kuat dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yang tercermin melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), menjadi indikator penting peningkatan mutu sumber daya manusia di wilayah tersebut dan mempercepat proses keluar dari kemiskinan yang bersifat struktural. Kajian empiris pada tingkat regional membuktikan bahwa peningkatan IPM berkontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Jawa Timur (Abdillah & Edi, 2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menegaskan bahwa peningkatan kualitas manusia merupakan dasar utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif (Siwi et al., 2022).

Berbagai penelitian di Indonesia menegaskan peran krusial pendidikan dalam menurunkan kemiskinan. Ritonga et al. (2024) menunjukkan bahwa angka melek huruf dan partisipasi sekolah berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Sumatera Utara periode 2017–2023, sejalan dengan temuan Rofi'i (2024) yang menekankan pentingnya peningkatan partisipasi sekolah di pedesaan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Faktor pendidikan tidak hanya menjadi instrumen pembangunan manusia, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi. Selain itu, indikator ekonomi makro seperti PDRB juga memegang peran penting; Hasibuan et al. (2022) dan Suleman & Hasibuan (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lokal berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di kota-kota Sumatera. Namun, sebagian besar studi ini berfokus di luar Jawa Timur, sehingga belum memperhitungkan karakteristik sosial-ekonomi wilayah dengan urbanisasi tinggi dan ketimpangan antar kabupaten/kota. Dimensi pembangunan manusia dan stabilitas harga turut memengaruhi kemiskinan, di mana Hasibuan (2023) menyoroti peran IPM, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan secara simultan, dan Permana & Pasaribu (2023) menemukan inflasi sebagai variabel paling sensitif bagi rumah tangga miskin di Sumatera. Mengingat Jawa Timur memiliki volatilitas harga pangan yang tinggi serta perbedaan kualitas sumber daya manusia antarwilayah, kajian kontekstual di tingkat kabupaten/kota diperlukan untuk memahami hubungan kausalitas antara pendidikan, PDRB, IPM, inflasi, dan kemiskinan secara lebih presisi (Safira & Setyowati, 2025).

Beberapa penelitian mengaitkan kebijakan fiskal dengan kemiskinan. Azzahra et al. (2022) menegaskan bahwa alokasi Dana Desa dan peningkatan IPM secara signifikan menurunkan kemiskinan di 34 provinsi Indonesia pada periode 2015–2020, sedangkan Rohmah & Prakoso (2022) menunjukkan bahwa IPM, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan pengeluaran per kapita berpengaruh konsisten terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Meskipun memberikan wawasan penting mengenai dimensi sosial pembangunan, studi-studi tersebut belum menguji secara simultan pengaruh pendidikan, pembangunan manusia, kondisi makroekonomi seperti PDRB dan inflasi, serta konteks spasial di Jawa Timur. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan kajian panel di tingkat kabupaten/kota Jawa Timur yang mengintegrasikan indikator ekonomi dan sosial secara komprehensif, sehingga diperoleh temuan empiris yang dapat menjadi dasar formulasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih kontekstual.



**Grafik 1. Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan Grafik 1 terlihat adanya kecenderungan penurunan yang relatif stabil setelah sempat mengalami kenaikan pada awal periode. Pada 2020, proporsi penduduk miskin berada di kisaran 11,1 persen dan meningkat menjadi 11,4 persen pada 2021 kenaikan yang besar kemungkinannya terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Namun sejak 2022 hingga 2024 angka kemiskinan menunjukkan tren menurun, hingga turun di bawah ambang 10 persen pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan proses pemulihan ekonomi yang berjalan efektif, yang mungkin didorong oleh perbaikan PDRB daerah, pengendalian inflasi, serta peningkatan kualitas pembangunan manusia di Jawa Timur. Meski demikian, tingkat kemiskinan tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan target nasional, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih terkoordinasi terutama dalam bidang pendidikan dan penciptaan lapangan kerja agar penurunan kemiskinan dapat terjadi secara lebih merata antar kabupaten/kota.

Fokus dari studi ini untuk menelaah faktor-faktor yang menentukan tingkat kemiskinan pada level kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024. Kajian ini berupaya mengidentifikasi variabel-variabel utama yang memengaruhi dinamika kemiskinan di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dijadikan representasi dari kapasitas ekonomi regional, yang mencerminkan sejauh mana aktivitas produksi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Variabel inflasi digunakan sebagai ukuran kestabilan harga, karena fluktuasinya secara langsung memengaruhi daya beli terutama pada kelompok berpendapatan rendah. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipergunakan untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, serta taraf hidup. Di samping itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) dimasukkan guna merefleksikan tingkat akses terhadap pendidikan serta sejauh mana peluang belajar dapat dijangkau oleh penduduk usia sekolah.

Tujuan studi ini adalah untuk menutup celah literatur mengenai faktor-faktor penentu kemiskinan dengan basis data kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode 2020–2024, khususnya dalam konteks pandemi dan fase pemulihan ekonomi. Dengan merumuskan model yang mengombinasikan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, IPM, dan APK, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana sinergi antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Keistimewaan penelitian ini terletak pada penggunaan data panel subnasional terkini, yang memungkinkan analisis dinamika jangka pendek dan panjang sekaligus menyingkap disparitas antarwilayah. Artikel ini disusun dalam beberapa bagian: pendahuluan yang memaparkan kronologi dan gap penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka teori, metodologi, hasil estimasi, pembahasan, serta simpulan yang merumuskan implikasi kebijakan.

## 2. Tinjauan Pustaka

Kajian teoritis tentang kemiskinan dan ketimpangan banyak merujuk pada kerangka Kuznets Curve, yang menjelaskan hubungan U-terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan, di mana pertumbuhan awal cenderung memperlebar kesenjangan sebelum akhirnya menurunkannya (Karountzos et al., 2022; Mao et al., 2022). Literasi terbaru menunjukkan perluasan konsep ini ke dimensi kemanusiaan dan lingkungan, seperti food insecurity Kuznets curve dan environmental Kuznets curve, yang menegaskan bahwa pembangunan awal dapat meningkatkan risiko ketidakamanan pangan atau degradasi lingkungan sebelum perbaikan terjadi seiring peningkatan kapabilitas ekonomi dan sosial (Wesselbaum et al., 2023; Khotiawan et al., 2023). Dalam konteks Jawa Timur, hal ini menekankan bahwa pertumbuhan PDRB harus bersinergi dengan faktor sosial dan kualitas manusia, termasuk pendidikan dan IPM, agar berdampak nyata pada pengurangan kemiskinan. Bukti empiris menunjukkan kanal kapabilitas manusia dan pendidikan secara konsisten menekan kemiskinan, di mana adopsi teknologi dan Society 5.0 meningkatkan ketahanan pembangunan manusia melalui produktivitas dan akses layanan dasar (Indrasto et al., 2025), sementara determinan APK dipengaruhi oleh faktor permintaan-penawaran pendidikan yang memperluas mobilitas sosial dan menurunkan kemiskinan jangka panjang (Pratama & Amalia, 2024). Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan, tetapi harus memperkuat capability expansion melalui literasi digital, infrastruktur pendidikan, dan peningkatan kualitas pembelajaran agar manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh rumah tangga rentan.

Hasil empiris makroekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung menurunkan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan daerah, sedangkan inflasi justru meningkatkan kemiskinan akibat erosi daya beli rumah tangga miskin (Aini & Islamy, 2021; Susanto & Pangesti, 2021). Studi subnasional mengungkapkan keragaman struktural: di Jawa Tengah, ketimpangan distribusi pendapatan memengaruhi efektivitas pertumbuhan terhadap kemiskinan (Oktaviani et al., 2023), sementara di Sumatera Selatan, pengangguran dan inflasi menjadi pendorong kemiskinan, menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja dan stabilisasi harga pada wilayah berbasis komoditas. Secara metodologis, penelitian menggunakan panel data untuk menangkap heterogenitas wilayah dan dinamika waktu, serta time-series regional untuk analisis kausal lokal; misalnya, estimasi panel di Pulau Sumatera menunjukkan signifikansi inflasi, IPM, UMP, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan (Permana & Pasaribu, 2023), sedangkan agregasi nasional cenderung parsial dan belum spesifik pada fase pandemi dan pemulihan (Pranizty & Septiani, 2021). Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang jelas: minimnya studi panel terbaru di tingkat kabupaten/kota Jawa Timur 2020–2024 yang secara simultan menguji pertumbuhan ekonomi, inflasi, IPM, dan APK, serta mengakomodasi potensi endogenitas dan heterogenitas spasial, yang sangat penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran (Mardiatillah et al., 2021; Pranizty & Septiani, 2021).

Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh kombinasi faktor makroekonomi dan sosial. Pranizty & Septiani (2021) menemukan bahwa pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan menentukan tingkat kemiskinan provinsi pada 2016–2020, menekankan perlunya pertumbuhan yang inklusif, sementara Mardiatillah et al. (2021) menunjukkan inflasi dan pengangguran meningkatkan kemiskinan di Sumatera Selatan, khususnya pada kelompok rentan. Hasil ini sejalan dengan teori Kuznets, yang menegaskan bahwa pertumbuhan awal sering memperlebar kesenjangan sebelum manfaat pembangunan menyebar, dan didukung oleh kajian global: Karountzos et al. (2022) menunjukkan pola Kuznets dalam ketimpangan di 39 negara, sedangkan Wesselbaum et al. (2023) menemukan food insecurity memburuk di tahap awal pembangunan, tetapi membaik seiring kematangan ekonomi, menegaskan dinamika non-linear pembangunan terhadap

kesejahteraan. Kajian di level provinsi juga menyoroti pentingnya distribusi pendapatan dan kualitas manusia: Oktaviani et al. (2023) menyatakan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, sedangkan Permana & Pasaribu (2023) menemukan inflasi, IPM, UMP, dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi kemiskinan di Sumatera, dengan inflasi sebagai faktor paling sensitif. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pertumbuhan ekonomi yang diiringi pemerataan kualitas manusia, stabilitas harga, dan akses pendidikan, serta analisis yang memperhatikan heterogenitas regional, khususnya di Jawa Timur, di mana studi pada level kabupaten/kota masih terbatas.

Kajian di wilayah lain juga memperkuat pentingnya indikator sosial dalam pengentasan kemiskinan. Rohmah & Prakoso (2022) menemukan bahwa IPM, rata-rata lama sekolah, TPT, dan pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Hal ini menekankan bahwa faktor pendidikan dan kualitas manusia memiliki dampak langsung pada pengurangan kemiskinan regional. Dalam skala global, Mao et al. (2022) memperluas teori Kuznets Curve ke dimensi ketidaksetaraan akses air rumah tangga, menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak merata dapat memperlebar ketimpangan kesejahteraan di tahap awal. Relevansi dari temuan ini bagi Jawa Timur adalah bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, disparitas antarwilayah tetap berpotensi memperbesar kesenjangan. Maka, kontribusi studi ini terletak pada penyediaan bukti empiris berbasis kabupaten/kota 2020–2024, yang dapat menjelaskan bagaimana interaksi antara faktor ekonomi dan pembangunan manusia memengaruhi dinamika kemiskinan di Jawa Timur.

### 3. Metode Penelitian

#### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, indeks pembangunan manusia, serta angka partisipasi kasar terhadap tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020–2024. Jenis data yang dimanfaatkan adalah data sekunder berbentuk panel, yang meliputi 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu penelitian tersebut. Seluruh data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dan publikasi resmi pemerintah daerah. Penggunaan data panel dipilih karena mampu menggambarkan perbedaan karakteristik antarwilayah sekaligus dinamika perubahan antarwaktu, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan penggunaan data cross-section atau time-series secara terpisah.

#### Model Penelitian

Model dalam penelitian adalah:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 PEK_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 APK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Model penelitian ini menggunakan variabel dependen *kemiskinan* (POV), dengan satuan ribu jiwa. Kemudian menggunakan empat variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi (PEK) yang diukur dengan persen. Kemudian variabel selanjutnya adalah (INF) yang diukur dari indeks harga konsumen. Kemudian variabel ketiga adalah (IPM) yaitu indeks pembangunan manusia. Variabel terakhir adalah angka partisipasi kasar (APK) dengan satuan persen, serta  $\varepsilon$  sebagai *error term*. Model ini dibangun berdasarkan teori Kuznets yang menekankan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kesejahteraan, serta diperkuat dengan pendekatan multidimensi kemiskinan.

#### Teknik Analisis

Penelitian ini menerapkan metode estimasi regresi data panel dengan membandingkan tiga pendekatan utama, yakni Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan

Random Effect Model (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow untuk membedakan antara CEM dan FEM, serta uji Hausman guna menentukan kelayakan penggunaan FEM atau REM. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan variasi data antarwilayah dan antarwaktu secara simultan, sehingga memberikan hasil analisis yang lebih akurat terhadap dinamika kemiskinan. Sejalan dengan pandangan Wooldridge et al. (2016), penggunaan data panel memberikan estimasi yang lebih efisien karena dapat memperhitungkan heterogenitas tak teramati. Dengan demikian, regresi panel dinilai tepat untuk menganalisis determinan kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Untuk memastikan validitas hasil estimasi, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik. Uji Lagrange Multiplier (LM) diterapkan untuk mendeteksi adanya autokorelasi, sementara multikolinearitas diperiksa melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF). Normalitas residual diuji menggunakan Jarque-Bera (JB) test, dan uji RESET digunakan untuk memeriksa spesifikasi model. Menurut Gujarati (2009), pemenuhan asumsi klasik menjadi prasyarat penting agar estimasi tidak bias dan dapat diandalkan secara statistik. Selain itu, untuk mengatasi potensi heteroskedastisitas maupun autokorelasi, penelitian ini juga menerapkan estimasi dengan robust standard error. Pendekatan menyeluruh ini menjamin bahwa model yang digunakan tidak hanya sesuai secara konseptual, tetapi juga memenuhi kriteria statistik yang diperlukan untuk menarik kesimpulan yang valid terkait determinan kemiskinan di Jawa Timur pada periode 2020–2024.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Pada Tabel 1 ditampilkan ringkasan estimasi model ekonometrik (CEM, FEM, REM) beserta hasil uji pemilihan modelnya.

**Tabel 1. Hasil Model Estimasi**

| Variabel       | Common Effect | Fixed Effect | Random Effect |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| Konstanta      | 1033,715*     | 399,9088*    | 500,9731*     |
| PEK            | 0,0007985*    | -0,0002827*  | 0,0000919     |
| CPI            | 1,081541      | -0,5673236*  | -0,3936718    |
| IPM            | -13,49645*    | -3.709936*   | -5,316596*    |
| APK            | 1,385884      | -0,3529213   | -0,249241     |
| R <sup>2</sup> | 0,7905        | 0,5592       | 0,519         |
| Prob.F         | 0,000         | 0,000        | 0,000         |

Uji Pemilihan Model

Chow

Cross-section  $F(22,88) = 205,26$ ; Prob.  $F(22,88) = 0,000$

Hausman

Cross-section random  $\chi^2(4) = 45,80$ ; Prob.  $\chi^2 = 0,000$

Uji Diagnosis

Multikolinieritas (VIF)

PEK = 1,17; CPI = 1,15; IPM = 1,01; APK = 1,01

Normalitas

JB(2) = 2,822; Prob. JB(2) = 0,2493

Otokorelasi

$\chi^2(3) = 0,576$ ; Prob.  $\chi^2(3) = 0,4559$

Heteroskedastisitas

$\chi^2(1) = 3,28$ ; Prob.  $\chi^2(1) = 0,070$

Linieritas

$F(3,107) = 1,62$ ; Prob.  $F(3,107) = 0,1895$

*Keterangan: Tanda \* signifikan pada 95%*

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, dapat disimpulkan bahwa model Fixed Effect (FEM) merupakan metode estimasi yang paling sesuai. Hal ini dibuktikan melalui nilai probabilitas statistik F dan  $\chi^2$  sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan tersebut menunjukkan bahwa FEM mampu menggambarkan variasi data dengan lebih akurat dibandingkan model lainnya (Wooldridge et al., 2016). Rincian hasil estimasi model ini ditampilkan pada Tabel 2, yang memuat nilai koefisien dan tingkat signifikansi masing-masing variabel independen.

Selanjutnya, dilakukan uji diagnostik untuk memastikan keabsahan model. Pertama, uji multikolinearitas menunjukkan seluruh nilai VIF berada di bawah ambang 10 (PEK = 1,17; CPI = 1,15; APK = 1,01), sehingga tidak terdapat indikasi multikolinearitas yang signifikan. Kedua, uji normalitas menghasilkan Prob = 0,2493, menandakan distribusi data bersifat normal. Ketiga, uji autokorelasi menghasilkan  $\chi^2(3) = 0,576$  dengan Prob = 0,4599 ( $>0,05$ ), menunjukkan model bebas dari autokorelasi. Keempat, uji heteroskedastisitas menunjukkan  $\chi^2(1) = 2,38$  dengan Prob = 0,070 ( $>0,05$ ), yang berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Terakhir, uji linearitas memperoleh  $F(3,107) = 1,62$  dengan Prob = 0,1895 ( $>0,05$ ), menandakan hubungan antarvariabel bersifat linear. Dengan demikian, model FEM telah memenuhi asumsi klasik utama, sehingga hasil estimasi dapat dianggap sah dan reliabel untuk dianalisis lebih lanjut (Raihan et al., 2022).

**Tabel 2. Hasil Estimasi FEM**

|  |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|
| $POV_{it} = 399,90 - 0,0002PEK_{it} - 0,567CPI_{it} - 3,709IPM_{it} + 0,352APK_{it}$ |         |         |         |         |
| (0,000)  | (0,037) | (0,025) | (0,000) | (0,221) |
| $R^2 = 0,5592$ ; $F_{(4,88)} = 27,91$ ; Prob. F = 0,0000                             |         |         |         |         |

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2, model Fixed Effect (FEM) dinyatakan layak digunakan karena probabilitas uji F tercatat 0,000 (kurang dari 0,01), yang mengindikasikan bahwa model secara keseluruhan signifikan. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,5592 mengungkapkan bahwa sekitar 55,92% variasi dalam variabel Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan angka partisipasi kasar; sisanya (44,08%) diperkirakan disebabkan oleh variabel lain di luar model. Untuk penilaian signifikansi variabel independen, digunakan pedoman Wooldridge et al. (2016): suatu variabel dianggap berpengaruh bila nilai p (p-value) dari uji t  $< 0,05$  pada tingkat signifikansi 5% (dan  $< 0,10$  untuk tingkat 10%). Dari hasil pada Tabel 2 terlihat bahwa angka partisipasi kasar tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan IPM berpengaruh signifikan pada tingkat 5%.

Koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0002 menunjukkan bahwa kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kemiskinan sebanyak 0,0002 ribu jiwa. Inflasi memiliki koefisien 0,567, yang berarti peningkatan 1% inflasi menurunkan kemiskinan sebesar 0,567 ribu jiwa. Sementara itu, koefisien angka partisipasi kasar sebesar 0,352 mengindikasikan bahwa peningkatan 1% angka partisipasi kasar justru meningkatkan kemiskinan sebesar 0,352 ribu jiwa.

## Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kegiatan ekonomi daerah mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga menurunkan jumlah penduduk miskin. Hasil ini mendukung temuan Pranizty & Septiani (2021) yang menegaskan peran pertumbuhan ekonomi dalam mereduksi kemiskinan antarprovinsi melalui penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor produktif. Dalam bingkai teori Kuznets, hubungan negatif tersebut mencerminkan fase penurunan pada kurva Kuznets—yaitu tahap di

mana distribusi pendapatan mulai membaik pasca-industrialisasi awal—yang menandakan bahwa pertumbuhan di Jawa Timur sudah menunjukkan karakter inklusif dan manfaat pembangunan mulai dirasakan kelompok berpendapatan rendah (Karountzos et al., 2022).

Penurunan angka kemiskinan seiring pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur juga diperkuat oleh diversifikasi struktur ekonomi daerah, khususnya di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Abdillah & Edi (2024) menemukan bahwa kenaikan PDRB per kapita di Jawa Timur berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga dan penurunan kemiskinan melalui efek multiplikasi lokal. Temuan ini selaras dengan Susanto & Pangesti (2021) yang menegaskan bahwa pertumbuhan hanya efektif menurunkan kemiskinan jika disertai stabilitas harga dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Mekanisme utama yang menyalurkan manfaat pertumbuhan kepada kelompok miskin adalah peningkatan produktivitas di sektor padat karya. Oleh karena itu, penguatan ekonomi daerah yang menekankan inklusi tenaga kerja dan peningkatan efisiensi sektor produktif perlu dijadikan kebijakan kunci untuk menjaga penurunan kemiskinan di Jawa Timur secara berkelanjutan.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (CPI) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di tingkat kabupaten/kota Jawa Timur; dengan kata lain, terjaganya stabilitas harga meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengurangi tekanan ekonomi pada kelompok berpendapatan rendah. Kondisi harga yang stabil menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong perluasan aktivitas sektor riil yang pada gilirannya menambah lapangan kerja. Temuan ini konsisten dengan Hasibuan (2023) yang menyatakan bahwa inflasi terkendali dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menekan pengangguran, sehingga berdampak pada penurunan kemiskinan. Studi Permana & Pasaribu (2023) juga melaporkan bahwa pengendalian inflasi dan peningkatan produktivitas di daerah Sumatera berkontribusi pada penurunan kemiskinan regional. Dalam konteks Jawa Timur, efisiensi rantai distribusi barang dan kestabilan harga pangan menjadi faktor penopang utama yang memperkuat efek negatif CPI terhadap kemiskinan.

Hubungan negatif antara CPI dan kemiskinan di Jawa Timur dapat dijelaskan melalui mekanisme *Kuznetsian Adjustment Effect*, di mana stabilitas harga berfungsi menjaga daya saing sektor produktif sekaligus memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika CPI relatif stabil, kenaikan biaya hidup tidak terlalu tajam sehingga kelompok miskin tidak mengalami penurunan pendapatan riil. Samputra & Munandar (2019) menekankan bahwa pengendalian harga merupakan elemen penting dalam tata kelola ekonomi makro yang efektif untuk menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan Leal & Marques (2022) yang menyatakan bahwa dalam kerangka Kuznets Curve, stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal adaptif menjadi korektif agar pertumbuhan tidak menimbulkan tekanan sosial. Dengan demikian, penurunan kemiskinan di Jawa Timur mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan inflasi yang rendah dan terkendali.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Dengan kata lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan, kesehatan, serta taraf hidup yang layak dapat menurunkan proporsi penduduk yang berada dalam kondisi miskin. Peningkatan IPM membuka peluang kerja lebih luas, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Aini & Islamy (2021) yang menyebutkan bahwa pendidikan dan kesehatan, sebagai komponen utama IPM, memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di tingkat nasional. Senada dengan itu, Samputra & Munandar (2019) menegaskan bahwa perbaikan IPM merupakan instrumen fundamental dalam memutus siklus kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar publik. Dengan demikian, kemajuan IPM di Jawa

Timur menjadi faktor utama yang memperkuat efek positif pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Korelasi negatif IPM dengan kemiskinan juga menandakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia mempercepat transformasi sosial-ekonomi. Oktaviani et al. (2023) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan dapat ditekan melalui peningkatan pendidikan dan pemerataan layanan publik, yang pada akhirnya menurunkan kemiskinan. Dalam konteks serupa, Septiadi & Nursan (2020) menemukan bahwa peningkatan IPM, terutama melalui kebijakan pendidikan dan pertanian, berperan penting dalam mempercepat penurunan kemiskinan di wilayah pedesaan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pembangunan manusia memberikan efek jangka panjang terhadap inklusi ekonomi. Di Jawa Timur, peningkatan IPM antarwilayah menunjukkan keberhasilan distribusi manfaat pembangunan, sehingga daerah dengan IPM tinggi cenderung memiliki kemiskinan lebih rendah dan kualitas hidup masyarakat yang lebih stabil.

Sementara itu, variabel Angka Partisipasi Kasar (APK) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan belum secara langsung menurunkan angka kemiskinan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah peserta didik yang belum diimbangi dengan mutu pendidikan serta kesesuaian keterampilan yang diajarkan dengan kebutuhan dunia kerja. Pratama & Amalia (2024) menjelaskan bahwa peningkatan APK sering mencerminkan kuantitas peserta didik, bukan kualitas, sehingga efeknya terhadap kesejahteraan ekonomi relatif lemah. Rohmah & Prakoso (2022) menambahkan bahwa pendidikan memiliki dampak tidak langsung terhadap kemiskinan melalui peningkatan produktivitas, bukan sekadar jumlah peserta didik. Dengan demikian, tingginya APK di Jawa Timur harus diimbangi dengan peningkatan mutu dan daya serap lulusan dalam sektor ekonomi.

Kecenderungan positif namun tidak signifikan APK juga menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem pendidikan dan dinamika pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Indrasto et al. (2025) menekankan bahwa di era Society 5.0, pendidikan harus menekankan tidak hanya peningkatan partisipasi, tetapi juga integrasi literasi digital dan kompetensi teknologi agar dapat berkontribusi nyata terhadap pembangunan manusia. Sementara itu, Hasibuan et al. (2022) menegaskan bahwa efek pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan lebih kuat bila didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan produktif. Artinya, peningkatan APK tanpa peningkatan kualitas kurikulum dan relevansi terhadap kebutuhan industri tidak cukup menekan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan di Jawa Timur perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran dan keterampilan aplikatif agar pendidikan benar-benar menjadi instrumen pengentasan kemiskinan.

## **5. Penutup**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur periode 2020–2024 dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi, tercermin dari peningkatan PDRB, berperan signifikan menurunkan kemiskinan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, sementara stabilitas harga yang ditunjukkan oleh CPI turut menekan kemiskinan dengan menjaga daya beli. Peningkatan IPM memiliki efek negatif signifikan terhadap kemiskinan, menegaskan pentingnya investasi pada pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup sebagai strategi pengentasan kemiskinan berkelanjutan. Di sisi lain, APK menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan, menandakan bahwa peningkatan partisipasi pendidikan belum diikuti kualitas dan relevansi keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, keberhasilan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur bergantung pada kombinasi pertumbuhan ekonomi dan efektivitas

pembangunan manusia, melalui peningkatan mutu pendidikan, integrasi teknologi, dan penguatan daya saing tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan yang merata antarwilayah.

#### Daftar Pustaka

- Abdillah, K., & Edi, A. S. (2024). Determinan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Dengan Pendekatan Makroekonomi. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(3), 645–654.
- Aini, L. N., & Islamy, S. N. (2021). Dampak pengangguran, pendidikan, kesehatan, PDRB dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(3), 132–141.
- Azzahra, S., Riani, W., & Mafruhat, A. Y. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi–Indonesia pada Tahun 2015-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(1), 1–8.
- Gujarati, D. N. (2009). *Basic econometrics*.
- Hasibuan. (2023). Analisis pengaruh ipm, inflasi, pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 53–62.
- Hasibuan, R. R. A., Kartika, A., Suwito, F. A., & Agustin, L. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 683–693.
- Indrasto, H. B. B., Nugroho, J. S., Salsabila, F., & Andriyani, N. (2025). Studi Prevalensi Teknologi Terhadap Resitensi Pembangunan Manusia di Era Society 5.0. *Ekonomikawan. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 25(1), 170–181.
- Karountzos, P., Gerogiannis, I., Douridas, I., Kapsimallis, N., Koukos, I., & Filka, P. (2022). Kuznets Revisited: An Econometric Exploration of Growth and Inequality Across 39 Economies. *Journal of Comprehensive Business Administration Research*.
- Khotiawan, M. R., Sakti, R. K., & Wahyudi, S. T. (2023). An Analysis of the Effects of Spatial Dependence on Economic Growth Among Regencies and Cities in Java. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 202–220.
- Leal, P. H., & Marques, A. C. (2022). The evolution of the environmental Kuznets curve hypothesis assessment: A literature review under a critical analysis perspective. *Heliyon*, 8(11).
- Mao, F., Miller, J. D., Young, S. L., Krause, S., & Hannah, D. M. (2022). Inequality of household water security follows a Development Kuznets Curve. *Nature Communications*, 13(1), 4525.
- Mardiatillah, R., Panorama, M., & Sumantri, R. (2021). Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di sumatera selatan tahun 2015-2019. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 18(2), 279–287.
- Oktaviani, N., Rengganis, S. P., & Desmawan, D. (2023). Pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 1(3), 176–189.
- Permana, H., & Pasaribu, E. (2023). Pengaruh inflasi, IPM, UMP dan PDRB terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1113–1132.
- Pranizty, T. P. I., & Septiani, Y. (2021). Determinasi Tingkat Kemiskinan Provinsi Indonesia 2016-2020. *EKOMBIS: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 7(2), 119–132.
- Pratama, M. S. I., & Amalia, F. (2024). Determinan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah di Indonesia. *Ekono Insentif*, 18(2), 94–106.
- Raihan, A., Muhtasim, D. A., Pavel, M. I., Faruk, O., & Rahman, M. (2022). An econometric analysis of the potential emission reduction components in Indonesia. *Cleaner Production Letters*. <https://doi.org/10.1016/j.clpl.2022.100008>
- Ritonga, J. R., Ginting, S., Naibaho, E., Situmorang, A., Simarmata, A. P., & Chairunisah, C. (2024).

- Pengaruh Angka Melek Huruf Dan Angka Partisipasi Sekolah Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2023. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 10(4), 676–681.
- Rofi'i, Y. U. (2024). Kemiskinan pedesaan dan angka partisipasi sekolah di Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 8(2).
- Rohmah, I. S. A., & Prakoso, J. A. (2022). Pengaruh IPM, RLS, TPT, dan pengeluaran perkapita terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 255–266.
- Safira, A., & Setyowati, E. (2025). Analisis Pengaruh Ekspor, Impor dan Investasi Asing Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-4 Tahun 2018-2023. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(2), 861–870.
- Samputra, P. L., & Munandar, A. I. (2019). Korupsi, indikator makro ekonomi, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). Pengentasan kemiskinan Indonesia: Analisis indikator makroekonomi dan kebijakan pertanian. *Jurnal Hexagro*, 4(1), 1–14.
- Siwi, V. N., Fevrieria, S., & Archintia, S. (2022). How Capital, Labor, and Technology Influence Java's Economic Growth. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 269–282.
- Suleman, A. R., & Hasibuan, A. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kota Padangsidimpuang. *Buletin Utama Teknik*, 17(1), 47.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271–278.
- Wesselbaum, D., Smith, M. D., Barrett, C. B., & Aiyar, A. (2023). A food insecurity Kuznets Curve? *World Development*, 165, 106189.
- Wooldridge, J. M., Wadud, M., & Lye, J. (2016). *Introductory econometrics: Asia pacific edition with online study tools 12 months*. Cengage AU